
LAPORAN KINERJA

Stasiun KIPM Cirebon

Triwulan I Tahun 2024

BPPMHKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON**

KANTOR & LABORATORIUM : JL. CIDENG INDAH NO.236 A
KEDAWUNG CIREBON TELP/FAX (0231)-248857
LAMAM www.kkp.go.id SUREL op.skipmcirebon@kkp.go.id

Nomor : B. 266/SKIPM.CRB/TU.210/IV/2024 5 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengantar Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Yth. Sekretaris Badan KIPM
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan I Tahun 2024, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024 Triwulan I atas capaian indikator kinerja yang pelaksanaan kegiatan/komponennya telah diselesaikan selama periode Triwulan I Tahun 2024. Berikut kami lampirkan Laporan Kinerja beserta lampirannya berupa Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Konseptor	Paraf
Kaur Umum	



Kepala Stasiun KIPM Cirebon

R. Rudi Barmara

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon (LKj Stasiun KIPM Cirebon) Triwulan I Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja setiap entitas atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dalam PK dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Stasiun KIPM Cirebon ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan masyarakat dalam pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Landasan penyusunan LKj triwulan ini adalah Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024 beserta realisasinya. Secara umum, pada Tahun 2024 Triwulan I, seluruh target kinerja utama yang ditetapkan berhasil dicapai dengan kategori baik.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai media akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi, serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Cirebon, 5 April 2024

Kepala,



R. Rudi Barmara

IKHTISAR EKSEKUTIF

Stasiun KIPM Cirebon dalam rencana kerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Badan KIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Stasiun KIPM Cirebon mempunyai 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 16 IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2020 - 2024 yang telah direvisi terakhir pada Tahun 2023 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.

Pada Triwulan I Tahun 2024, telah diukur capaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 5 IKU/IK. Berdasarkan pengukuran kinerja dalam Aplikasi Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Kinerja per Triwulan I Tahun 2024 adalah 111,50 %. Secara keseluruhan nilai kinerja organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2024 sebesar 111,50 % atau masuk dalam kriteria Istimewa (biru), yaitu sebanyak 5 IKU/IK yang harus diukur pada telah mencapai/melebihi target, sebagaimana pada **Tabel 1** berikut.

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2024 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.577.133.877,00 atau 28,39% dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp5.555.027.000,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp3.977.893.123,00 atau 71,61%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 per akhir Maret yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dari Kementerian Keuangan sebesar 100.

Tabel 1.
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN I

TAHUN	: 2024						
UNIT KERJA	: STASIUN KIPM CIREBON						
NKO	: 111,50						
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2024	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	%
S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif						107,34
IKS. 1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	%	Maximize	98	98	100	102,04
IKS. 4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	UPI	Maximize	10	2	2	100,00
IKS. 5	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	produk	Maximize	60	60	117	120,00
S.02	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif						107,15
IKU 7	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	84	84	90,01	107,15
S.03	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP						120,00
IKU 12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	80	80	100	120,00

Keterangan : Tingkat capaian kinerja dibatasi sampai dengan 120% (Sumber : aplikasi kinerjaku.kkp.go.id)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Ikhtisar Eksekutif	ii	
Daftar Isi	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	I. Latar Belakang	1
	II. Arah Kebijakan	2
	III. Dasar Hukum	3
	IV. Tugas dan Fungsi	3
	V. Agenda SKIPM Cirebon	4
	VI. Dasar Pengukuran Kinerja	4
	VII. Tujuan Pengukuran Kinerja	4
	VIII. Ruang Lingkup	5
	IX. Waktu Pengukuran Kinerja	5
	X. Metodologi Pengukuran Kinerja	5
	XI. Sistematika Penyajian	5
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
	I. Rencana Strategis 2020 -2024	6
	II. Rencana Kinerja Tahunan	8
	III. Penetapan Kinerja 2022	9
	IV. Program dan Kegiatan Tahun 2022	10
	V. Rencana Aksi Pencapaian IKU	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	11
	I. Pengelolaan Kinerja	11
	II. Capaian Kinerja	11
	III. Realisasi Rencana Aksi	18
	IV. Analisis Realisasi Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran	18
	V. Analisis Capaian Kinerja	18
BAB IV	PENUTUP	19
	I. Kesimpulan	19
	II. Permasalahan	19
LAMPIRAN		20

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Cirebon wajib melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun berjalan untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Cirebon. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan motivasi dalam peningkatan kinerja Stasiun KIPM Cirebon serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Stasiun KIPM Cirebon dibantu oleh Kepala Urusan Umum, Para Katimja, JF tertentu dan JF Umum.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung Stasiun KIPM Cirebon saat ini berjumlah 42 orang pegawai terdiri dari 29 PNS dan 13 Tenaga Kerja Kontrak (PPNPN). Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu, Stasiun KIPM Cirebon juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Struktur organisasi Stasiun KIPM Cirebon tergambar sebagaimana pada Gambar 1 berikut.



STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON
(PermenKP No. 92/PERMEN-KP/2020)



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Cirebon

II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STASIUN KIPM CIREBON

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Cirebon disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan dan strategi SKIPM Cirebon sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran melalui peningkatan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

III. DASAR HUKUM

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.

IV. TUGAS - FUNGSI

Sampai dengan saat Laporan Kinerja Triwulan I disusun, organisasi dan tata kerja UPT di lingkup BPPMHKP – KKP belum terbit, sehingga Stasiun KIPM Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan penerapan sistem manajemen mutu.

Adapun tugas pencegahan dan pengawasan HPIK dan hayati ikan telah dilaksanakan oleh UPT Badan Karantina Indonesia (BKI).

V. AGENDA STASIUN KIPM CIREBON

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. KKP. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan melaksanakan kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Dukungan Manajemen UPT.

VI. DASAR PENGUKURAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.
4. Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
5. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon dengan Kepala BPPMHKP tanggal 16 Januari 2024.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 032.13.2.649732/2024, tanggal 24 November 2023.

VII. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.

2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama organisasi.

VIII. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup capaian kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Stasiun KIPM Cirebon dan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani antara Kepala UPT dengan Kepala BPPMHKP.

IX. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang diukur : Januari – Maret 2024
2. Waktu pengukuran : 1-24 April 2024 (SE Relaksasi waktu oleh MenPAN RB)

X. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan :

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja sampai dengan 31 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Kinerja Berbasis Dialog Kinerja (Matriks Peran Hasil/MPH) Tahun 2024.
2. Pemantauan atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU.

XI. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyusunan laporan merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengelolaan kinerja, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 dan realisasi rencana aksi sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.
- d. Bab IV – Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/ permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Sejalan dengan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Renstra Badan KIPM 2020-2024 menjadi dasar bagi Unit Pelaksana Teknis dibawahnya untuk menyusun usulan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan BPPMHKP dan KKP.

Visi KKP untuk mendukung visi Presiden "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Adapun visi – misi BPPMHKP dan Stasiun KIPM Cirebon berdasarkan Renstra 2020 – 2024 dan turunannya, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Stasiun KIPM Cirebon yang mengacu pada Visi KKP adalah Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong."

2. Misi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 2 (dua) dari 4 (empat) Misi KKP, yaitu: (1) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional; (2) Misi ke-3 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan (3) Misi ke-4 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan

hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

3. Tujuan

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Tujuan Stasiun KIPM Cirebon sebagai UPT BPPMHKP yang mendukung/bertanggung jawab pada pencapaian agenda prioritas KKP dengan salah satu kebijakan **“Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan”** yaitu dengan :

- a. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
- b. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
- c. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

4. Sasaran Kegiatan

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai Stasiun KIPM Cirebon dari program yang dilaksanakan, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Pada Tahun 2024, mengacu Sasaran Kegiatan BPPMHKP Stasiun KIPM Cirebon menetapkan 3 sasaran kegiatan, sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif;
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif; dan
- c. Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP.

II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama di lingkup **Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**. Rincian outputnya adalah :

- a. Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan (5 sertifikat);
- b. Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan (1 produk);
- c. Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (60 sertifikat);
- d. Pengawasan dan pengendalian produk (3 produk);
- e. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* (10 UPI); dan
- f. Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (21 UPI).

2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Pada program ini, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama di lingkup **Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan** dengan rincian output :

- a. Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik (1 unit kerja); dan
- b. Usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar,, sistem dan regulasi (2 lokasi).

3. Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama Dukungan Manajemen dengan rincian output :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana bidang TI dan komunikasi (4 unit);
- b. Layanan Humas (1 layanan);
- c. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (1 layanan);
- d. Layanan Umum (1 layanan);
- e. Layanan Data dan Informasi (1 layanan);
- f. Layanan Perkantoran (1 layanan);
- g. Layanan sarana dan prasarana internal (3 unit);
- h. Layanan manajemen SDM (2 layanan);
- i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 layanan); dan
- j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 layanan)

III. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	98
		2	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5
		3	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	3
		4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)	10
		5	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (produk)	60
		6	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	21
Kegiatan 2. Penerapan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	84
		8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan QA sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (lokasi)	2
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen				
SK 3	Tatakelola pemerintahan yang baik	9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Cirebon (<i>Indeks</i>)	84
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	85
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	75
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Lingkup Stasiun KIPM Cirebon) (Nilai)	93,75
		14	Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	82
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	80

Sumber : PK yang telah ditandatangani oleh Kepala BPPMHKP dan Kepala UPT pada Tahun 2024

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN STASIUN KIPM CIREBON

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja BPPMHKP, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan 3 program, dengan rincian komponen kegiatan, antara lain :

1. Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan;
2. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI;
3. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik;
4. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Traceability;
5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
6. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat berbasis digital terhadap layanan BPPMHKP;
7. Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025);
8. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
9. Layanan Umum dan Rumah Tangga;
10. Gaji dan Tunjangan;
11. Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
12. Layanan Perencanaan dan Penganggaran; dan
13. Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

V. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU/IK

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun KIPM Cirebon telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai IKU dan target waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi, Stasiun KIPM Cirebon dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 sebagaimana pada **Lampiran 1**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. PENGELOLAAN KINERJA

Dalam rangka memantau capaian kinerja, manajemen melakukan pengukuran kinerja secara berkala. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan, diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi berbasis *website www.kinerjaku.kkp.go.id*. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai perkembangan capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja yang ditetapkan dalam Surat Tugas Kepala Stasiun KIPM Cirebon Nomor B.32/SKIPM.CRB/KP.440/I/2024, tanggal 2 Januari 2024, tentang Tim Manajemen Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Cirebon.

Perhitungan dilakukan terhadap capaian indikator kinerja dari setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang. Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, akan dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Tabel 3. Rentang penilaian capaian kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Sesuai dengan pendekatan BSC, Sasaran Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang diukur keberhasilannya melalui capaian **16 IKU** dengan target yang ditentukan.

II. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dari Januari – Maret 2024. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan I Tahun 2024,

target Sasaran dan IKU yang diukur menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya dalam periode s.d Triwulan I Tahun 2024. Target Sasaran dan IKU sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 tersaji pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Sasaran Kegiatan dan IKU/IK yang diukur pada Triwulan I Tahun 2024

TAHUN	: 2024						
UNIT KERJA	: STASIUN KIPM CIREBON						
NKO	: 111,50						
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2024	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	%
S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif						107,34
IKS. 1	Rasio ekspor hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	%	Maximize	98	98	100	102,04
IKS. 4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	UPI	Maximize	10	2	2	100,00
IKS. 5	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	produk	Maximize	60	60	117	120,00
S.02	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif						107,15
IKU 7	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	84	84	90,01	107,15
S.03	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP						120,00
IKU 12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	80	80	100	120,00

Keterangan: * Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Seluruh IKU/IK target pada Triwulan I Tahun 2024 tersebut, telah dilakukan pengukuran baik secara manual (LCK) maupun menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (www.kinerjaku.kkp.go.id). Pada Tabel 4, nilai capaian kinerja IKU Triwulan I mencapai nilai **111,50%** secara keseluruhan (5 IKU), ditunjukkan melalui skor kinerja sebesar **111,50%** yang masuk dalam kriteria **Istimewa** (biru). Hasil dari capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa

capaian kinerja atas 5 dari 16 IKU yang diukur pada Triwulan I Tahun 2024 telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan (hijau/biru).

Capaian kinerja yang dihasilkan dari kinerja masing – masing IKU, mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan sasaran tersebut. Capaian kinerja masing – masing Indikator dari masing-masing Sasaran dan IKU dapat disampaikan sebagaimana berikut :

SK 01
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

IKU 1 Rasio ekspor hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

Rasio ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon adalah (jumlah HC ekspor yang memenuhi syarat mutu dikurangi penolakan oleh Negara tujuan) /Jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan x 100%. Periode pengukuran IKU ini triwulan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 5. Capaian IKU 1 sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi s.d. TW I	% Capaian thdp target tahunan *)
Rasio ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	98%	98%	100%	102%	100%	102%

Sumber : hasil pengolahan data ekspor hasil perikanan lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id*

Jumlah permohonan sertifikasi ekspor hasil perikanan pada triwulan I sebanyak 244 HC dan selama triwulan I tidak terdapat notifikasi kasus penolakan oleh negara tujuan ekspor, sehingga realisasi persentase ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon sebesar 100% dari target 98%. Keberhasilan capaian mencapai target kinerja 102% tersebut disebabkan kehati-hatian eksportir dalam memenuhi persyaratan ekspor terkait penanganan produk oleh negara tujuan ekspor baik secara administrasi maupun *quality controll* produk. Adapun upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain memberikan layanan dan edukasi pemahaman persyaratan ekspor komoditi hasil perikanan ekspor baik secara administrasi maupun *quality* produk.

Realisasi anggaran atas komponen sertifikasi kesehatan ikan secara keseluruhan sampai dengan triwulan I mencapai Rp8.910.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp42.180.000,00 atau 21,12% dari total anggaran yang tersedia.

IKU 4 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem *Traceability* (UPI)

Traceability atau sistem ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait. Mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No. 170/PER-BKIPM/2019 tentang Penerapan Sistem *Traceability* (ketertelusuran) di UPI, bahwa UPI harus menyusun dan menerapkan sistem ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim UPI yang telah mendapatkan Surat keterangan Penerapan Sistem *Traceability*. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU ini seperti pada tabel berikut.

Tabel 6. Capaian IKU 4 sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi s.d. TW I	% Capaian thdp target tahunan
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)	2	10	2	100%	2	20%

Sumber : Laporan hasil kegiatan. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Evaluasi penerapan *traceability* terhadap UPI pada Tahun 2024 telah dilaksanakan terhadap 2 UPI, yaitu PT Bumi Menara Internusa dan PT Adi Jaya Mandiri, sehingga capaiannya mencapai 100% dari target 2 UPI pada TW I dan mencapai 20% dari target tahunan sebanyak 10 UPI. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 100% disebabkan semakin meningkatnya kesadaran UPI dalam menerapkan sistem *traceability*. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah dilaksanakannya verifikasi penerapan *traceability* terhadap seluruh UPI yang berada di wilayah administrasi SKIPM Cirebon.

Adapun realisasi anggaran komponen/kegiatan Monev Penerapan Sistem *Traceability* pada UPI sampai dengan triwulan I sebesar Rp1.160.000,00 atau 18,01% dari pagu anggaran sebesar Rp6.440.000,00.

IKU 5 Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Stasiun KIPM Cirebon (produk)

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP adalah jumlah ruang lingkup produk hasil inspeksi pada tahun berjalan dan jumlah ruang lingkup produk hasil pemeliharaan sistem yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU ini seperti pada tabel berikut.

Tabel 7. Capaian IKU 5 sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi s.d. TW I	% Capaian thdp target tahunan
Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (produk)	60	60	117	120%	117	120%

Sumber : Laporan hasil kegiatan dan by sistem/aplikasi Honest

Pada triwulan I terdapat penambahan 4 ruang lingkup baru dari yang sudah ada sebelumnya. Capaian triwulan I keseluruhan sebanyak 117 produk atau 120% dari target 60 produk. Angka capaian terhadap target tahunan adalah 120%. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 120% disebabkan meningkatnya ruang lingkup ekspor hasil perikanan sehingga UPI yang mengajukan sertifikasi HACCP meningkat. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah melaksanakan sertifikasi HACCP untuk ruang lingkup baru dan verifikasi HACCP tahunan atas UPI di wilayah administrasi Stasiun KIPM Cirebon.

Adapun realisasi anggaran komponen/kegiatan Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI sampai dengan triwulan I sebesar Rp6.380.000,00 atau 14,18% dari pagu anggaran sebesar Rp45.000.000,00.

SK 02
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

IKU 7 Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 7 seperti pada tabel berikut.

Tabel 8 Capaian IKU 7 sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi s.d. TW I	% Capaian thdp target tahunan
Indeks kepuasan masyarakat layanan Stasiun KIPM Cirebon (indeks)	84	84	90,01	107%	90,01	107%

Sumber : website ptsp.kkp.go.id

Pada triwulan I telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat yang telah diprogramkan setiap triwulan menggunakan alat bantu kuesioner berbasis digital (website ptsp.kkp.go.id) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,01 dari target 84,00 sehingga capaian IKU sebesar 107%. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 107% disebabkan peningkatan pelayanan publik secara prima dan pembenahan fasilitas layanan yang lebih memadai. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah berusaha konsisten dalam melayani masyarakat pengguna jasa sesuai dengan standar pelayanan prima. Dalam hal IKU ini, tidak terdapat komponen/alokasi anggaran secara khusus dalam RKA K/L TA 2024.

SK 03
Tata kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP

IKU 12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada SKIPM Cirebon berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan/LHP (terbatas pada Laporan Hasil Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit s.d. triwulan I Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh SKIPM Cirebon yang menjadi objek pengawasan. Capaian IKU diukur dengan membandingkan (jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Itjen KKP melalui Laporan Hasil Pengawasan) x 100%. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 12 seperti pada tabel berikut.

Tabel 9 Capaian IKU 12 sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW I	Target Tahunan	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi s.d. TW I	% Capaian thdp target tahunan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	75%	75%	100%	120%	100%	120%

Sumber : Data diolah dari aplikasi SIDAK. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pengukuran capaian dilakukan pada triwulan I dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun KIPM Cirebon dan memanfaatkan untuk perbaikan kinerja SKIPM Cirebon. Hasil tindak lanjut *diupload* dan disampaikan ke Tim PTL Itjen melalui aplikasi pengawasan SIDAK. Sampai dengan Tahun 2024, Stasiun KIPM Cirebon mampu mempertahankan pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan sebagai perbaikan kinerja dengan capaian 100% dari target 75% yang ditunjukkan dengan informasi data dalam aplikasi SIDAK. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 120% tersebut disebabkan rekomendasi hasil pengawasan telah 100% ditindaklanjuti secara tuntas untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon. Upaya nyata yang telah dilakukan antara lain memperbaiki kinerja pegawai dengan mengimplementasikan rekomendasi hasil pengawasan, seperti menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2024.

III. REALISASI RENCANA AKSI

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dilakukan evaluasi secara periodik, minimal triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana aksi pencapaian perjanjian kerja Tahun 2024 sebagaimana **terlampir**.

Kegiatan pendukung pencapaian IKU Tahun 2024 berjumlah sekitar 28 komponen/kegiatan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, terdapat 5 IKU yang telah mencapai/melampaui target.

IV. ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon s.d. Triwulan I TA 2024 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.577.133.877,00 atau 28,39% dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp5.555.027.000,00 sehingga sisa anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp3.977.893.123,00 atau 71,61%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I Tahun 2024 yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN sebesar 100.

V. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TA 2024 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Stasiun KIPM Cirebon telah melakukan perbandingan capaian kinerja s.d. Triwulan I Tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024.

Berdasarkan target kinerja Tahun 2024 sebanyak 16 IKU, terdapat 5 IKU yang ditargetkan dilakukan pengukurannya pada triwulan I Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 4. Secara umum, 9 IKU yang dilakukan pengukuran tersebut telah mencapai/melebihi target yang ditetapkan. Hasil analisis terbatas terhadap IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan I Tahun 2024 dengan membandingkan terhadap target setahun pada TA 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif” (SK 1) dicapai dengan 3 IKU. Pada triwulan I target IKU yang diukur sebanyak 3 IKU, yaitu :
 - IKU 1 - Rasio ekspor hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor, dengan capaian kinerja 102,04%;
 - IKU 4- Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability*, dengan capaian kinerja 100%;
 - IKU 5 - Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerjanya 120%;Atas capaian 3 IKU pada triwulan I diketahui bahwa capaian kinerja atas ketiga IKU telah mencapai/melebihi target ($\geq 100\%$) sehingga kinerja yang telah dihasilkan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada triwulan berikutnya.
2. Sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif” (SK 2) dicapai dengan satu IKU. Pada triwulan I target IKU yang diukur sebanyak satu IKU, yaitu :
 - IKU 7- Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerjanya 107,15%;Atas capaian IKU 7 pada triwulan I diketahui bahwa hasil kinerja melebihi target, sehingga kinerja yang telah dihasilkannya dapat dipertahankan/ditingkatkan pada triwulan berikutnya.
3. Sasaran kegiatan “Tata kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP” (SK 3) dicapai dengan 1 IKU. Pada triwulan I target IKU yang diukur sebanyak 1 IKU, yaitu :
 - IKU 12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;Atas capaian satu IKU pada triwulan I diketahui bahwa capaian kinerja melebihi target, sehingga kinerja yang telah dihasilkannya dapat dipertahankan/ditingkatkan pada triwulan/tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Cirebon Triwulan I Tahun 2024 menginformasikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Cirebon selama triwulan I Tahun 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Stasiun KIPM Cirebon pada Triwulan I Tahun 2024 antara lain :

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Manajemen Kinerja Stasiun KIPM Cirebon dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon pada Triwulan I Tahun 2024 adalah **Istimewa**, dengan Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (**NPSS**)/Skor Kinerja IKU Triwulan I Tahun 2024 mencapai **111,50**; demikian juga secara keseluruhan IKU sebesar **111,50** atau secara umum capaian kinerja di atas target sehingga kinerja perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.
2. Sebanyak 5 dari 16 IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan I Tahun 2024, seluruhnya telah mencapai/melebihi target.
3. Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2024 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.577.133.877,00 atau 28,39% dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp5.555.027.000,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp3.977.893.123,00 atau 71,61%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 per akhir Maret yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dari Kementerian Keuangan sebesar 100.

II. PERMASALAHAN & SARAN PERBAIKAN

Pada proses pencapaian dan pengukuran capaian kinerja selama triwulan I ini belum ditemukan permasalahan yang signifikan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id EMAIL setban.bkipm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KIPM CIREBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. Rudi Barmara**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

R. Rudi Barmara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KIPM CIREBON**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	98
	2	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Sertifikat)	5
	3	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	3
	4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)	10
	5	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Produk)	60
	6	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Cirebon (UPI)	21
Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	7	Indeks kepuasan masyarakat layanan Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	84
	8	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar, sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	2
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	84
	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	85
	11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	100
	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	75
	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	93,75
	14	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	82
	15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	80
	16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	80

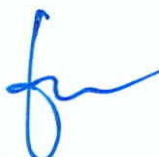
Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	258.460.000
	Pengendalian Mutu	258.460.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.215.500.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	1.215.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	5.296.567.000
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	5.296.567.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon Tahun 2024		6.770.527.000

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon



R. Rudi Barnara

Rincian Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Unit Kerja STASIUN KIPM CIREBON

No	Tahun	Perspektif	Kode SS	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Validasi	Polarisasi	Frekuensi	Konsolidasi	Perhitungan	Satuan	Target												Definisi	Formula	Sumber Data				
													1 Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov				Des			
1	2024	Internal Process	S.01	Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	KS.1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	outcome	Maximize	Triwulan	Dipersesmp (Rata-rata)	Rata-rata	%	98	0	0	98	0	0	98	0	0	98	0	0	98	0	0	98	Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Bukti pemenuhan persyaratan adalah diterimanya sertifikat kesehatan ikan (HC) di negara tujuan ekspor dan produk bermutu serta aman dikonsumsi.	$X = \frac{A - P}{B}$ X = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor A = Jumlah HC ekspor yang memenuhi syarat mutu P = Penolakan oleh negara tujuan ekspor B = Jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan	Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
2	2024	Internal Process	S.01	Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	KS.2	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Cirebon	outcome	Maximize	Tahun	Dipersesmp (Rata-rata)	Nilai Posisi Akhir	Sertifikat	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Cara Penanganan Ikan yang Baik merupakan pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sertifikat CPIB di supplier merupakan sertikat yang diberikan kepada unit pengumpul/supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu unit pengumpul/supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB.	$S = A + B$ S = Jumlah sertifikat CPIB A = Jumlah sertifikat CPIB yang baru diterbitkan pada periode tahun berjalan B = Jumlah sertifikat CPIB perpanjangan pada tahun berjalan	Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
3	2024	Internal Process	S.01	Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	KS.3	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	outcome	Maximize	Semester	Komponen Pembentuk (Akumulasi)	Nilai Posisi Akhir	lokasi	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHPK) berkontibusi dalam implementasi Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat bersama dengan beberapa instansi terkait antara lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BP-POM, Pemerintah kabupaten/kota dl. Lokasi yang menjadi objek pengendalian perikanan mutu hasil perikanan domestik adalah kabupaten/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokasi pasar modern, pasar tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik.	\sum Lokasi kabupaten/kota yang menjadi objek pengendalian perikanan mutu hasil perikanan domestik	Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
4	2024	Internal Process	S.01	Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	KS.4	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability	outcome	Maximize	Triwulan	Adopsi Langsung (Sama Persis)	Nilai Posisi Akhir	UPI	10	0	0	2	0	0	5	0	0	8	0	0	10	Traceability atau sistem keterelusuran merupakan sistem untuk menjamin kemampuan menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen terkait. Unit Pengolahan Ikan (UPI) membuktikan penerapan sistem traceability dengan simulasi penerapannya pada saat dilakukan evaluasi/inspeksi sistem traceability, kemudian UPI yang dinyatakan memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan Penerapan Sistem Traceability yang berlaku 2 tahun.	\sum UPI yang telah mendapatkan Surat Keterangan Penerapan Sistem Traceability	Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu Hasil Perikanan			
5	2024	Internal Process	S.01	Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	KS.5	Sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Cirebon	outcome	Maximize	Triwulan	Dipersesmp (Rata-rata)	Nilai Posisi Akhir	Sertifikat Ruang Lingkup Produk	60	0	0	15	0	0	30	0	0	45	0	0	60	Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.	$A = B + C$ Keterangan: A = Jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP B = hasil inspeksi pada tahun berjalan C = hasil pemeliharaan sistem yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi	Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu Hasil Perikanan			

No	Tahun	Perspektif	Kode SS	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Validasi	Polarisasi	Frekuensi	Konsolidasi	Perhitungan	Satuan	Target												Definisi	Formula	Sumber Data			
													1 Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov				Des		
6	2024	Internal Process	S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	KS.6	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Cirebon	outcome	Maximize	Tahun	Komponen Pembentuk (Akumulasi)	Nilai Posisi Akhir	UPI	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	UPI yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah UPI yang menerapkan persyaratan dasar serta penerapan sistem mutu berdasarkan konsep PMMT/HACCP dan penerapan sistem keterelusuran.	X ² UPI yang telah diinspeksi dan diverifikasi penerapan HACCP nya oleh inspektur mutu SKIPM Cirebon	Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
7	2024	Internal Process	S.02	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	KS.7	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT Cirebon	outcome	Maximize	Triwulan	Dipersempit (Rata-rata)	Nilai Posisi Akhir	Nilai	84	0	0	84	0	0	84	0	0	84	0	0	0	0	84	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan asaratur penyelenggaraan pelayanan publik. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah unsur = 1/9 = 0,1111. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = (Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang tersaji) x Nilai penimbang	Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
8	2024	Internal Process	S.02	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	KS.8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan QA sesuai standar, sistem dan regulasi lingkup UPT Cirebon	outcome	Maximize	Semester	Komponen Pembentuk (Akumulasi)	Nilai Posisi Akhir	lokasi	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Verifikasi Quality Assurance merupakan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses pembudidayaan ikan yang meliputi pembenihan dan pembesaran apakah sudah memenuhi persyaratan/standar di lokasi Kawasankampung budidaya. Ruang lingkup verifikasi Quality Assurance meliputi Sosialisasi Quality Assurance dan pembentukan pokja Quality Assurance, bimbingan teknis petugas Quality Assurance, pelaksanaan verifikasi Quality Assurance, pelaporan dan penyampaian rekomendasi ke menteri.	X Lokasi yang telah dilakukan verifikasi Quality Assurance di lokasi/Kawasan budidaya	Ketua Tim Kerja Standarisasi Sistem
9	2024	Internal Process	S.03	Tata kelola pemerintahan yang baik	KS.9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Cirebon	outcome	Maximize	Tahun	Lingkup dipersempit	Nilai Posisi Akhir	Indeks	86	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	86	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT. Stasiun KIPM Cirebon yaitu : I. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugasnya. II. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). III. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.	a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dan pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP. b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut: Perhitungan nilai DIKLAT PIM. Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya. I. Pegawai Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.	Database kepegawaian SIMPEG Online KKP dan Portal MyASN BKN
10	2024	Internal Process	S.03	Tata kelola pemerintahan yang baik	KS.10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Cirebon	outcome	Maximize	Tahun	Komponen Pembentuk (Akumulasi)	Nilai Posisi Akhir	Nilai	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi Dimana instansi pemerintah telah mengubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi anggaran (input) atau kegiatan (output) menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkup Stasiun KIPM Cirebon dilaksanakan oleh Sekretariat BKIPM sesuai dengan Peraturan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat 'D' sampai dengan 'AA'.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

No	Tahun	Perspektif	Kode SS	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Validasi	Polarisasi	Frekuensi	Konsolidasi	Perhitungan	Satuan	Target												Definisi	Formula	Sumber Data				
													1 Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov				Des			
11	2024	Internal Process	S. 03	Tata kelola pemerintahan yang baik	KS.1.1	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Cirebon	outcome	Maximize	Tahun	Komponen Pembentuk (Akumulasi)	Nilai Posisi Akhir	%	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon TA. 2024 = (Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA.2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan / Jumlah Nilai Temuan yang diselesaikan) x 100% Keterangan: Persentase penyelesaian temuan BPK harus 100%	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	
12	2024	Internal Process	S. 03	Tata kelola pemerintahan yang baik	KS.1.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Cirebon	outcome	Maximize	Triwulan	Adopsi Langsung (Sama Peras)	Nilai Posisi Akhir	%	80	0	0	80	0	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektoral Jenderal Kepada satker BPPMHPK berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Revisi dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan I Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh satker BPPMHPK yang menjadi objek pengawasan.	Jumlah Rekomendasi = (Σ Ni / Σ N) * 100 Keterangan: Σ Ni = Rekomendasi dari LHP Inspektoral Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Stasiun KIPM Cirebon ; Σ N = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektoral Jenderal KKP yang diberikan kepada Stasiun KIPM Cirebon	Aplikasi SIDAK TL KKP	
13	2024	Internal Process	S. 03	Tata kelola pemerintahan yang baik	KS.1.3	Nilai IKPA lingkup UPT Cirebon	outcome	Maximize	Semester	Diperepsmt (Rata-rata)	Nilai Posisi Akhir	Nilai	93,76	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	93,76	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran, pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu: pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, rekas, realisasi, pagu minus dan dispersasi SPM.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran = Σ a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n + o + p + q + r + s + t + u + v + w + x + y + z Revisi DIPA (jumlah) = (Σ Revisi SP2D / Σ SP2D Terbit) * 100 Bobot 5% Saldo III DIPA (jumlah) = (Realisasi Perkiraan Dasar) - (Perencanaan Halaman III DIPA) / Perencanaan Halaman III DIPA Bobot 5% Penggunaan UP (jumlah) = (Σ SPN GUP yang disampaikan tepat waktu / Σ SPN GUP) * 100 Bobot 5% Rekon LPJ Berstatus = (Σ Data LPJ Berstatus yang disampaikan tepat waktu / Σ Data Berstatus yang disampaikan ke KPPN) * 100 Data Kontrak (jumlah) = (Σ Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu / Σ Data Kontrak yang disampaikan ke KPPN) * 100 Bobot 5% Penyelesaian Tagihan (jumlah) = (Σ Tagihan yang disampaikan tepat waktu / Σ Total Tagihan) * 100 Bobot 5% Realisasi Penyerapan Anggaran (jumlah) = (Σ Realisasi Anggaran / Σ Pagu) * 100 Bobot 5% Retur SP2D (jumlah) = (Σ Retur SP2D / Σ SP2D Terbit) * 100 Bobot 5% Perencanaan Kas (jumlah) = (Σ Data Rekas yang disampaikan tepat waktu / Σ Data Rekas yang disampaikan ke KPPN) * 100 Bobot 5% Pengembalian SPM (jumlah) = (Σ SPM salah / Σ Total SPM yang disampaikan ke KPPN) * 100 Bobot 5% Dispersasi Penyerapan SPM (jumlah) = (Σ Dispersasi SPM / Σ Total yang disampaikan ke KPPN) * 100 Bobot 5% Pagu Minus (jumlah) = (Σ Pagu Minus / Σ Pagu) * 100 Bobot 5% Pembagian Nilai Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi SIMPMK.	Aplikasi OMSPAN KEMENKEU	
14	2024	Internal Process	S. 03	Tata kelola pemerintahan yang baik	KS.1.4	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Cirebon	outcome	Maximize	Tahun	Diperepsmt (Rata-rata)	Nilai Posisi Akhir	Nilai	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011	Aplikasi SMART KEMENKEU	Aplikasi SMART KEMENKEU	
15	2024	Internal Process	S. 03	Tata kelola pemerintahan yang baik	KS.1.5	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup SKIPM Cirebon	outcome	Maximize	Tahun	Lingkup diperepsmt	Nilai Posisi Akhir	%	77,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I dukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1. Rencana umum pengadaan telah diupad ke dalam aplikasi SIRUP (20%) 2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%) 3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%). 4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
16	2024	Internal Process	S. 03	Tata kelola pemerintahan yang baik	KS.1.6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan lingkup SKIPM Cirebon	outcome	Maximize	Tahun	Lingkup diperepsmt	Nilai Posisi Akhir	%	77,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I dukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%); 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%); 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen



Cirebon, 16 Januari 2024
Fidrik Risko
Kepala Stasiun KIPM Cirebon

R.Rudi Barma

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA STASIUN KIPM CIREBON TAHUN 2024



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Kinerja suatu unit kerja/organisasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai prestasi atas pencapaian yang telah ditargetkan oleh unit kerja tersebut pada periode waktu tertentu. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan unit organisasi di lingkup KKP dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sejalan dengan hal tersebut, Stasiun KIPM Cirebon menyusun rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2024, sebagaimana terinci dalam dokumen ini.

Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon tahun 2024 bertujuan memberikan panduan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Stasiun KIPM Cirebon dalam rangka mencapai tujuan dan target-target kinerjanya. Adapun harapannya adalah agar kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dapat membantu dalam pencapaian target kinerja Stasiun KIPM yang terarah, terukur, dan tercapai sesuai target kinerja.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024 ini. Kami sangat berkenan jika ada masukan/saran yang membangun dalam rangka perbaikan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini, dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi yang berkepentingan. Terima kasih.



Cirebon, 22 Januari 2024
Kepala,


R. Rudi Barmara, S.Pi, M.P.
NIP 19690414 199203 1 005

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	Target Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Target Output Bulanan													
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des		
2 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Indeks kepuasan masyarakat layanan Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	Peringatan Pelayanan Publik	12,500,000	Laporan	1						1								
	8	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar, sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	Pengadaan bahan uji laboratorium Tahap I (RM)	17,551,000	Paket	1						1								
			Pengadaan bahan uji laboratorium Tahap II (PNBP)	68,020,000	Paket	1														
			Perjalanan dinas Quality Assurance	11,640,000	Laporan	2													2	
			Perjalanan monitoring kepatuhan pelaku usaha importasi	8,040,000	UPI	7								1	1	2	1	2		
3 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Perjalanan dinas Peningkatan Kualitas SDM	24,700,000	Orang	3						1						2		
	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Layanan pemantauan dan evaluasi	2,000,000	Laporan	2			2											
			Maintenance Reformasi Birokrasi	10,000,000	Laporan	2						1							1	
	11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Administrasi keuangan	28,340,000	Laporan	1													1	
	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Administrasi keuangan	28,340,000	Laporan	1			1											
	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Administrasi keuangan	28,340,000	Laporan	1														1
	14	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Administrasi keuangan	28,340,000	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Pengelolaan PBJ	42,000,000	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Penghapusan BMN	2,300,000	Laporan	2							1							1	



Cirebon, 22 Januari 2024
Kepala SKIPM Cirebon

R. Rudi Barmara

R. Rudi Barmara, S.Pi.,M.P.
NIP. 19690414 199203 1 005